



▶ BANTUAN SOSIAL

## Dana BKK DIY Belum Juga Turun

**UMBULHARJO-** Pencairan dana untuk keluarga miskin dan rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Jogja terhambat. Pasalnya, hingga kini dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemda DIY belum juga turun.

Abdul Hamid Razak  
hamied@harianjogja.com

Pt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jogja Bejo Suwarno mengakui jika dana tersebut belum bisa dicairkan untuk bantuan keluarga miskin PKH. BKK dari Pemda DIY tersebut rencananya diberikan kepada 49 penerima sasaran fasilitasi dan jejaring ekonomi keluarga miskin dan penerima PKH. "Kami masih menunggu

► Besaran dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp2,3 juta per keluarga penerima sasaran.

► Meski dana BKK dari DIY belum turun, Pemkot Jogja memilih untuk tidak melayangkan surat ke Pemda DIY.

pencairan dana dari provinsi. Karena dana itu memang dana bantuan dari provinsi," kata Bejo, Jumat (10/8).

Rencananya besaran dana BKK DIY adalah sebesar Rp2,3 juta per keluarga penerima sasaran. Meski dana tersebut belum turun, Pemkot Jogja diakui Bejo tidak akan mengirimkan surat ke Pemda DIY terkait dana tersebut.

Pemkot, kata dia, lebih memilih pasif dengan menunggu pencairan dana tersebut. Pasalnya, hingga kini dia berkalah masih ada waktu

### BKK UNTUK JOGJA DALAM ANGKA

<p><b>Rp521 Juta</b> Total pagu BKK yang diterima Pemkot Jogja tahun ini.</p> <p><b>Rp2,3 Juta</b> Besaran dana BKK yang diterima oleh masing-masing keluarga penerima sasaran di Jogja.</p> <p style="font-size: x-small;">sumber: wawancara (har)</p>	<p><b>49</b> Total penerima sasaran fasilitasi dan jejaring keluarga miskin dan penerima Program Keluarga Harapan Kota Jogja.</p> <p><b>40</b> Total penerima bantuan jamban yang dianggarkan melalui BKK senilai Rp5 juta per penerima.</p>	<p><b>LOKASI PADAT KARYA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalarjo.</li> <li>2 Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo</li> </ol> <p><i>"Dilaksanakan dengan sumber anggaran BKK DIY"</i></p>
---	--	--

untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi dan jejaring ekonomi keluarga miskin dan PKH. "Kalau dana turun kan tinggal menyalurkan ke penerima. Apalagi dana itu juga sifatnya membantu kesejahteraan keluarga miskin dan PKH," ucap dia.

Kendati begitu penggunaan dana BKK harus tetap dikontrol. Menurut Bejo pengawasan penggunaan dana BKK tersebut dilakukan oleh pendamping petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Kepala Bappeda Jogja Edy Muhammad menyebut total pagu BKK DIY pada 2018 ini sebesar Rp521 juta. Selain untuk fasilitasi jejaring ekonomi keluarga miskin, dana BKK nantinya juga digunakan untuk pembangunan jamban bagi 40 penerima sasaran senilai Rp5 juta per penerima.

Dana itu, kata Edy juga digunakan untuk kegiatan padat karya berupa pengecoran jalan di Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalarjo dan Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo yang melibatkan 40 warga miskin setempat.

"Sampai triwulan II/2018 ini belum ada realisasi keuangan BKK karena masih dalam proses pencairan," kata Edy.

**Ig. Trihastono, S.Sos, MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005